

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAMARINDA

Diana Lestari¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Samarinda, diana_lestari82@yahoo.co.id

ABSTRAK:

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Kota Samarinda khususnya mengetahui besarnya pengaruh faktor PDRB Perkapita, investasi swasta, inflasi terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tahun 2000-2013. Alat analisis yang digunakan regresi liner berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa hasil uji F menunjukkan apakah variabel independen secara keseluruhan bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Secara parsial PDRB Perkapita berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. Dalam hal ini berarti hipotesis yang pertama yang menyatakan PDRB perkapita berpengaruh positif terhadap PAD diterima. Investasi swasta berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD. Dalam hal ini berarti hipotesis yang kedua yang menyatakan Investasi swasta berpengaruh positif signifikan terhadap PAD ditolak. Inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD. Dalam hal ini berarti hipotesis yang ketiga yang menyatakan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap PAD ditolak.

Kata Kunci: PAD, PDRB Perkapita, Investasi Swasta, Inflasi, dan Kota Samarinda

ABSTRACT:

The purpose of this study was to analyze factors that influence PAD Samarinda in particular determine the influence factor of the GDP per capita, private investment, inflation on revenue of Samarinda years 2000-2013. The analytical tool used multiple linear regression. The study found that the F test results show whether the independent variables as a whole together have an effect on the dependent variable. Partially, the GDP per capita significant positive effect on revenue. In this case means the first hypothesis stating that GDP per capita has positive influence on revenue received. Private investment is not significant positive effect on local revenues. In this case means that the second hypothesis which states private investments significant positive effect on PAD rejected. Inflation is not a significant positive effect on local revenues. In this case means the third hypothesis which states that inflation significant negative effect on PAD rejected.

Keywords: PAD, the GDP per capita, Private Investment, Inflation, and Samarinda

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan desentralisasi ini tentu saja memerlukan sumber pendanaan yang besar. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Penyerahan urusan dan pemberian sumber pendanaan dalam bentuk kebijakan perimbangan keuangan pada daerah otonom, pada hakekatnya

ditujukan untuk memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menyikapi aspirasi masyarakat dan prioritas daerah guna mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat di daerah, serta secara lebih luas diharapkan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut Ketentuan Umum UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan atau ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu: (a) memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggungjawabnya; (b) mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah, (c) meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah; serta (d) meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda 10 tahun terakhir yang terdiri dari 4 komponen (pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, dan pendapatan lain-lain yang sah) menunjukkan bahwa perkembangan PAD Kota Samarinda selama sepuluh tahun terakhir dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan penjelasan di atas retribusi merupakan salah satu pendapatan yang ikut menentukan usaha pengembangan pendapatan asli daerah. Dari sektor itu diharapkan agar dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Retribusi telah mampu memberikan andil atau sumbangan penerimaan dana yang cukup berarti bagi pendapatan asli daerah. Pungutan retribusi tersebut diantaranya adalah retribusi pasar yang merupakan salah satu pungutan retribusi yang potensial dalam memberikan pemasukan yang cukup terhadap pendapatan asli daerah.

PDRB perkapita adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi dalam seluruh perekonomian daerah (Adisasmitha, 2005: 23). Dalam hal ini berarti peningkatan PDRB perkapita mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut. Didalam keterkaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), PDRB perkapita secara positif mempengaruhi PAD, yakni apabila pendapatan suatu penduduk meningkat maka tingkat konsumsi penduduk akan barang dan jasa juga akan meningkat yang akan mempengaruhi PAD di kota Samarinda.

Investasi swasta merupakan Realisasi penanaman modal swasta asing atau swasta dalam negeri dan pembentukan modalnya dalam pengeluaran untuk membeli barang atau modal yang dapat menaikkan produksi barang dan jasa di masa akan datang (Arsyad, 1996:4). Didalam keterkaitan investasi swasta dengan PAD yakni dengan semakin banyak perusahaan asing swasta dan perusahaan swasta dalam negeri menginvestasikan uangnya di Kota Samarinda maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat, dikarenakan banyaknya modal yang masuk ke kas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, dengan banyaknya perusahaan asing swasta dan perusahaan swasta dalam negeri menginvestasikan dan membuat suatu lapangan kerja maka tingkat Tenaga Kerja di Kota Samarinda juga akan meningkat yang akan mempengaruhi tingkat konsumsinya, perubahan pola konsumsi merupakan salah satu indikator yang digunakan

untuk menunjukkan peningkatan kesejahteraan. Secara umum, pendapatan yang tinggi menyebabkan persentase pengeluaran untuk bukan makanan relatif tinggi.

Inflasi adalah suatu keadaan naiknya harga barang atau jasa dalam jangka panjang secara umum, dan yang menjadi penyebab utamanya yakni Jumlah Uang Beredar (Dumair: 1992). Dalam keterkaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), apabila inflasi naik maka harga barang atau jasa meningkat, masyarakat pun akan lebih cenderung menabung di bank dari pada membelanjakan kebutuhan sekunder. Akan tetapi apabila inflasi turun maka konsumsi masyarakat akan meningkat yang memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Kota Samarinda khususnya mengetahui besarnya pengaruh faktor PDRB Perkapita, investasi swasta, inflasi terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda.

TINJAUAN LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:94). Warsito (2001:128) menjelaskan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30)

Adapun sumber-sumber pendapatan asli menurut Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 yaitu :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :

1) Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

2) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu.

2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan Nilai Proksi dari Pendapatan Setiap Jumlah Penduduk yang diperoleh dari jumlah PDRB dibagi Jumlah Penduduk, yang bisa sebagai gambaran Daya Beli Masyarakat. Suatu perekonomian sedang tumbuh dan berkembang apabila adanya serangkaian peristiwa yang timbul untuk mewujudkan peningkatan pendapatan perkapita dalam jangka panjang. Sehingga sekalipun ada satu waktu di mana pendapatan perkapita seolah-olah terhenti namun diwaktu yang akan datang terjadi peningkatan pendapatan, maka ini terdapat pembangunan ekonomi. Menurut Samuelson dan Nordhaus (1986;98) pendapatan menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari upah, atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga, dan deviden, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial dan asuransi pengangguran. Menurut Todaro (1994) dalam arti luas pendapatan terdiri dari keuntungan-keuntungan ekonomis yang diterima seseorang dalam satu periode. Menurut Sukirno (1995;55) Apabila pendapatan

pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposable. Jadi pada hakekatnya pendapatan disposable adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh para penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian, untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang mereka inginkan, tapi biasanya tidak semua pendapatan disposable itu digunakan untuk tujuan konsumsi, sebagian daripadanya ditabung dan sebagian lainnya dipergunakan untuk membayar biaya untuk pinjaman yang dipergunakan untuk membeli barang secara mencicil. Pendapatan yang diterima rumah tangga berasal dari dua sektor yaitu dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan untuk sektor perusahaan, dan dari pembayaran gaji dan upah untuk sektor pemerintah. Dengan demikian PDRB perkapita adalah sebagai proksi pendapatan masyarakat akan berpengaruh terhadap konsumsi, dengan kata lain meningkatnya pendapatan masyarakat tentunya mengarah kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga meningkat, karena bagaimanapun juga masyarakat terikat pada kebutuhannya akan barang dan jasa. Sejalan dengan hal tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terpengaruh secara positif seiring dengan peningkatan PDRB perkapita tersebut.

Investasi Swasta

Investasi Swasta adalah penanaman modal atau pembentukan modal adalah pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat menaikkan produksi barang dan jasa di masa akan datang. Menurut Arsyad (1999;62), pola investasi dalam suatu perekonomian tergantung pada kebijaksanaan pemerintah. Jika pemerintah merencanakan pengeluaran yang besar di bidang pelayanan umum dan barang publik seperti jalan kereta api, listrik, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya, maka COR nya akan tinggi. Hal yang sama akan terjadi jika pembangunan di sektor-sektor dasar dan industri berat. COR ini akan rendah jika pola investasi lebih ditekankan pada pembangunan pertanian dan perindustrian rakyat dan padat karya. Selanjutnya COR bergantung kepada kebijaksanaan ketenagakerjaan. Di negara berpenduduk padat seperti Indonesia dimana pengangguran cukup banyak, kebijaksanaan pemerintah untuk mengatasi pengangguran dengan cepat akan mengarahkan investasi pada pembangunan jalan raya, pengairan, reklamasi tanah, rumah sakit, sekolah, perumahan dan pekerjaan umum lainnya. Dengan kondisi tersebut maka COR akan relatif tinggi, karena pembangunan proyek-proyek tersebut membutuhkan modal yang tidak sedikit. Tetapi kebijaksanaan pemerintah mengarah pada penyerapan pengangguran pada industri besar, khususnya industri manufaktur, maka COR akan lebih kecil. Hanya sedikit sekali modal dan ketenagakerjaan yang digunakan pada industri seperti itu bila dibandingkan dengan pekerjaan umum. Selanjutnya Tjiptoheriyanto (1999;74), dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas barang/jasa yang dihasilkan biasanya paling tidak ada dua pilihan, yaitu (1) melakukan investasi modal (fisik) sehingga dapat dihasilkan barang dalam jumlah yang besar dan kemudian secara otomatis akan menurunkan harga barang tersebut untuk dapat bersaing, dan (2) melakukan investasi sumber daya manusia sehingga dapat menghasilkan suatu barang-barang yang berkualitas. Investasi swasta mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, pendapatan meningkat, daya beli masyarakat meningkat sehingga akan berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Inflasi.

Inflasi adalah kenaikan dalam harga rata-rata, dan harga adalah tingkat dimana uang yang dipertukarkan untuk mendapatkan barang dan jasa. (Mankiw dalam Dumairy: 1997) tingkat inflasi merupakan perubahan prosentase dalam seluruh tingkat harga dan sifatnya selalu bervariasi setiap waktu dan terjadi untuk semua negara. Dalam teori klasik menyebutkan bahwa teori sepenuhnya fleksibel (Mankiw dalam Dumairy: 1997). Kebanyakan ekonom percaya bahwa asumsi ini secara akurat menjelaskan perilaku perekonomian dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, banyak harga sulit diperkirakan dalam jangka waktu pendek. Sudarsono dan Edilius (2001;96) memberikan definisi inflasi adalah sebagai berikut: inflasi adalah suatu proses atau peristiwa kenaikan tingkat harga umum. Selanjutnya definisi inflasi yang dikemukakan oleh Nopirin (2000;98) bahwa: inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus. Dalam pengertian inflasi di atas, kita tidak mengatakan bahwa selama masa inflasi, semua harga meningkat dalam proporsi yang sama dan memang jarang sekali terjadi laju kenaikan yang sama. Pada masa inflasi, terjadi tingkat harga-harga umum yang diukur dengan indeks harga. Indeks harga yang meningkat berarti inflasi. Bila indeks harga menurun atau bertanda negatif, berarti telah terjadi deflasi. Di dalam teori kuantitas, dijelaskan bahwa sumber utama terjadinya inflasi adalah adanya kelebihan permintaan (*demand*) sehingga uang yang beredar di masyarakat bertambah banyak. Inflasi merupakan penyakit dalam ekonomi yang dapat melemahkan daya beli masyarakat, akibatnya tingkat konsumsi juga mengalami pengurangan sehingga pengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah adalah berpengaruh negatif.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan atas perundang-undangan yang berlaku dalam kerangka peraturan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah ditambah dengan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Data yang diambil dari Tahun 2000-2013 di Kota Samarinda.

PDRB Perkapita

PDRB Perkapita (X1) merupakan pendapatan jumlah penduduk yang diperoleh dari jumlah PDRB dibagi jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu. Data yang diambil dari Tahun 2000-2013 di Kota Samarinda.

Investasi Swasta

Investasi Swasta (X2) adalah realisasi penanaman modal swasta asing dan swasta dalam negeri. Data yang diambil dari Tahun 2000-2013 di Kota Samarinda.

Inflasi

Inflasi (X3) adalah suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang-barang dan jasa secara umum dan yang menjadi penyebab utamanya yakni JUB (jumlah uang beredar). Data yang diambil dari Tahun 2000-2013 di Kota Samarinda.

Data Penelitian

Dalam penelitian ini, yang diteliti adalah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda, dan yang mana yang lebih berpengaruh lebih dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2000-2013. Adapun data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah : Data Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda, Data PDRB perkapita Kota Samarinda, Data Investasi swasta Kota Samarinda, Data Inflasi Kota Samarinda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Samarinda.

Alat Analisis

Dalam menganalisis dan mengadakan pembahasan mengenai hasil penelitian serta dalam rangka pengujian hipotesis tersebut maka Penulis menggunakan persamaan linier berganda dengan penyelesaian sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e \dots\dots\dots \text{(Hasan,1999:250)}$$

Maka:

- Y = Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda
- X₁ = PDRB Perkapita
- X₂ = Investasi Swasta
- X₃ = Inflasi
- b₀ = Konstanta

Angka koefisien determinasi menunjukkan presentase tingkat kebenaran prediksi dari model regresi. Nilai koefisien determinasi (R²) menyatakan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam model regresi. Sedangkan sisanya (100%-R²) dapat dijelaskan oleh sebab-sebab lain selain variabel independen di luar dari penelitian (Ghozali, 2006). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini diuji dengan melihat hasil pengujian dari ANOVA (Ghozali, 2006). Hasil pengambilan keputusan didasarkan pada: Jika probabilitas > 0,05, maka H_a ditolak; Jika probabilitas < 0,05, maka H_a diterima. Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan t dihitung terhadap t tabel dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2006) :Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5 % (0.05) dengan kriteria sebagai berikut :Jika probabilitas (nilai signifikansi) < tingkat signifikansi 5 % maka H_a diterima dan H_o ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika probabilitas (nilai signifikansi) > tingkat signifikansi 5% maka H_o diterima dan H_a ditolak berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Analisis regresi linier berganda perlu menghindari penyimpangan asumsi klasik supaya tidak timbul masalah dalam penggunaan analisis tersebut. Agar dalam analisis

regresi diperoleh model-model regresi yang bisa dipertanggungjawabkan maka akan digunakan asumsi-asumsi sebagai berikut: berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokolerasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan data time series, di mana menggunakan data sekunder berupa variabel bebas antara lain; PDRB perkapita, Investasi Swasta dan Inflasi yang mempengaruhi Pajak Asli Daerah di Kota Samarinda. Adapun data yang digunakan masing-masing variabel yang akan diukur dalam penelitian ini dapat dilihat lebih rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Statistik Deskripsi Variabel Penelitian

	Minimum	Maximum	Rata-Rata	Std. Dev.
PAD	10.38	338.16	117.20	93.44
PDRB	11,133,670.3	55,040,140.00	28,944,007.60	16,611,814.37
INVESTASI	700,855.56	4,439,500.00	1,621,738.59	1,131,245.14
INFLASI	4.06	1,664.00	756.65	496.48

Sumber: data sekunder diolah, 2016

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi (R^2) besarnya antara 0-1 atau $0 < R < 1$, apabila nilai koefisien determinasi semakin mendekati angka 1, maka variabel bebas makin besar pengaruhnya terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel 2. diketahui nilai R^2 adalah 0,835, hal ini menunjukkan bahwa 83,5 persen variasi variabel PAD dapat dijelaskan oleh variasi variabel Inflasi, Investasi Swasta dan PDRB Perkapita, sedangkan sisanya sebesar 16,5 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Tabel 2. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.914a	.835	.785	43.28663

a. Predictors: (Constant), INFLASI, INVESTASI, PDRB

Sumber: Data Sekunder diolah, 2016

Tabel 3. Anova

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	94773.517	3	31591.172	16.860	.000b
	Residual	18737.326	10	1873.733		
	Total	113510.843	13			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), INFLASI, INVESTASI, PDRB

Sumber: Data Sekunder diolah, 2016

Tabel 4. Coefficients

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2641.774	474.809		-5.564	.000
PDRB	164.003	62.050	1.038	2.643	.025
INVESTASI	-5.083	52.325	-.034	-.097	.925
INFLASI	.052	.034	.274	1.532	.156

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2016

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah variabel independen secara keseluruhan bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 3. diketahui nilai F Hitung 16,860 dengan signifikansi 0.000. hasil menunjukkan bahwa secara keseluruhan bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap struktur modal (DER) dan mengisyaratkan bahwa model yang dibentuk telah menunjukkan model yang baik/layak (*goodness of fit*). Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dari tabel 4. dapat diambil keputusan sebagai berikut :

Pengujian hipotesis pertama, pengaruh PDRB Perkapita terhadap PAD. Dari tabel tingkat signifikansi hasil pengolahan data diketahui bahwa PDRB perkapita mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.025 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. sedangkan didapat nilai t hitung lebih besar dari t tabel. sehingga dapat dikatakan bahwa PDRB Perkapita berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. Dalam hal ini berarti hipotesis yang pertama yang menyatakan PDRB perkapita berpengaruh positif terhadap PAD diterima.

Pengujian hipotesis kedua, pengaruh investasi swasta terhadap PAD. Dari tabel tingkat signifikansi hasil pengolahan data diketahui bahwa investasi swasta mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.925 lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05. sedangkan didapat nilai t hitung lebih kecil dari t tabel. sehingga dapat dikatakan bahwa Investasi swasta berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD. Dalam hal ini berarti hipotesis yang kedua yang menyatakan Investasi swasta berpengaruh positif signifikan terhadap PAD ditolak.

Pengujian hipotesis ketiga, pengaruh inflasi terhadap PAD. Dari tabel tingkat signifikansi hasil pengolahan data diketahui bahwa inflasi mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.156 lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05. sedangkan didapat nilai t hitung lebih kecil dari t tabel, sehingga dapat dikatakan bahwa inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD. Dalam hal ini berarti hipotesis yang ketiga yang menyatakan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap PAD ditolak.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan ini penelitian adalah hasil uji F menunjukkan apakah variabel independen secara keseluruhan bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Secara parsial PDRB Perkapita berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. Dalam hal ini berarti hipotesis yang pertama yang menyatakan PDRB perkapita berpengaruh positif terhadap PAD diterima. Investasi swasta berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD. Dalam hal ini berarti hipotesis yang kedua yang menyatakan Investasi swasta berpengaruh positif signifikan terhadap PAD ditolak. Inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD. Dalam hal ini berarti hipotesis yang ketiga yang menyatakan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap PAD ditolak. Untuk penelitian selanjutnya perlu menambah berbagai variabel lain dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. H.R., (2005). *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Graha Ilmu. Jakarta
- Arsyad L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Dumair (2002) *Perekonomian Indonesia*. Erlangga, Jakarta.
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hasan, Iqbal. (2006). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Bumi Aksara. Jakarta
- Mamesah, D, J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Pustaka. Jakarta
- Nopirin. (2000). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro Edisi Pertama*. BPFE. Yogyakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Pusat dan Daerah Tahun 2000. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Sukirno. Sadono, (1995), *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Penerbit Bina Grafika, Jakarta
- Samuelson, P.A., W.D. Nordhaus (1986) *Ekonomi*, Edisi Keduabelas, Jilid I, Diterjemahkan oleh A. Jaka Wasana, Erlangga, Jakarta
- Sudarsono, Edilius. (2001). *Konsep Ekonomi: Uang dan Bank*. Rineka Cipta. Jakarta
- Todaro, Michael, (1994) *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Tjiptoherijanto, Priyono, (1996), *Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Nasional*, FE UI. Jakarta
- Warsito. (2001). *Hukum Pajak*. PT. Rajawali, Jakarta.